

MODEL KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN RISIKO BANJIR DI KABUPATEN LAHAT

Oleh:

Trecy Austin^{1*}, Arif Rahman Hakim², Sutinah³, Clara Amelya Rossa⁴

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^{2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*Email Korespondensi: trecy.austin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan model tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan risiko banjir di Kabupaten Lahat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kolaboratif dari Ratner yang terdiri atas tiga dimensi utama: (1) identifikasi hambatan dan peluang, (2) debat strategi untuk mempengaruhi, dan (3) perencanaan tindakan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif dalam penanggulangan banjir telah diimplementasikan dengan cukup baik, dengan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi penanggulangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan penting. Pertama, kesulitan dalam mengakses dan mengelola data kebencanaan, khususnya terkait banjir, menghambat proses perencanaan. Kedua, pelaksanaan strategi di lapangan kerap menghadapi tantangan teknis dan koordinatif. Ketiga, belum semua pihak secara konsisten berpartisipasi dalam forum evaluasi pascabencana, sehingga efektivitas perencanaan kolaboratif menjadi kurang optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan komunikasi antar-stakeholder, serta pembentukan mekanisme evaluasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem penanggulangan banjir yang tangguh di Kabupaten Lahat.

Kata kunci: banjir, kolaborasi, penanggulangan risiko, tata kelola, Lahat

Abstract

This study aims to elaborate on the collaborative governance model for flood risk management in Lahat Regency. Using a qualitative approach, data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The research adopts Ratner's theoretical framework of collaboration, which consists of three key dimensions: (1) identifying obstacles and opportunities, (2) debating strategies for influence, and (3) planning collaborative actions. The results reveal that the collaborative model has been generally implemented well, with active involvement of various stakeholders, including local government, disaster management agencies, and community groups, in both decision-making processes and disaster response strategies. However, several obstacles were identified. First, difficulties in accessing and managing disaster-related data, particularly regarding flood events, have hindered effective planning. Second, challenges in implementing strategies at the field level often arise due to limited resources or lack of coordination. Third, some stakeholders fail to participate consistently in post-disaster evaluation meetings, reducing the effectiveness of collaborative planning. These findings suggest that although the foundation for collaborative governance exists, there is a critical need to enhance institutional coordination, improve stakeholder communication, and establish a regular and inclusive evaluation mechanism. Strengthening these aspects will contribute to a more resilient and integrated flood risk management system in Lahat Regency.

Keywords: flood, collaboration, risk management, governance, Lahat

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berada di persimpangan tiga lempeng tektonik dunia yang sangat struktural sehingga rawan terjadi berbagai macam bencana alam. Hal tersebut karena di sepanjang wilayahnya membentuk deretan gunung api atau sering disebut sebagai cincin api (*ring of fire*)(Utami, 2022). Fenomena bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia, yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alami serta faktor manusia, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan penghidupan, kerugian terhadap manusia, lingkungan, harta benda, dan berdampak psikologis(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Banjir merupakan peristiwa daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang air, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi(Munawal Akbar Idati et al., 2020). Banjir telah terjadi selama setengah abad terakhir, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan aset negara, memberikan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi, dan menyebabkan kematian serta penderitaan manusia yang meluas(Tone et al., 2022). Berdasarkan data dari *The Emergency Event Database* (EM-DAT) dalam laporan yang dituliskan, memperlihatkan bencana alam banjir terjadi di seluruh Negara tahun 2021 dengan kasus 223 dari total 432 bencana alam. 4.143 korban jiwa meninggal dunia dalam kasus banjir, banjir sebagai bencana yang paling mematikan dari semua bencana

alam(Cred, 2021). Berdasarkan data Badan Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sepanjang tahun 2023 terdapat 4.940 bencana alam yang terjadi, diantaranya 1.170 bencana banjir. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (*run off*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran Sungai. Apabila banjir tidak ditanggulangi dengan sungguh-sungguh maka bencana tersebut akan memunculkan banyak kerugian baik secara individu ataupun sosial(Indonesiabaik, 2024).

Kabupaten Lahat merupakan wilayah yang berisiko tinggi mengalami bencana banjir(BNPB, 2024). Berdasarkan letak geografis Kabupaten Lahat terletak diantara 30 25'-40 15' Lintang Selatan dan 1020 37'-1030 45' Bujur Timur(Lahat, 2020). Luas Kabupaten Lahat adalah 4.361,83 Km² dengan sebagian besar merupakan wilayah dataran tinggi hingga ketinggian 1000 Mdpl (Hiraliyamaesa H et al., 2023). Wilayah dataran rendah hanya terdapat di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Barat dengan ketinggian antara 25-100 mdpl. Melihat topografi dan keadaan wilayah, Kabupaten Lahat berpotensi terhadap beberapa bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

Banjir telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menangani banjir, namun tindakan perlindungan banjir yang tersedia bagi masyarakat diterapkan di

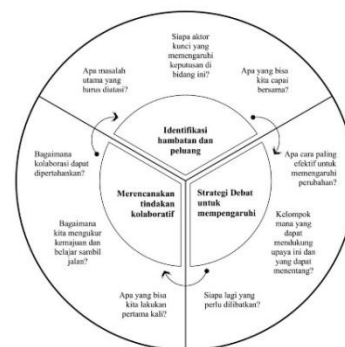
sejumlah lokasi terbatas, dan kerusakan lingkungan justru menghambat dibandingkan memitigasi kerusakan yang berdampak tidak merata (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2021). Masyarakat untuk tidak membangun rumah di bantaran sungai, menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi, serta menciptakan hutan bakau. Program-program ini memerlukan keterlibatan masyarakat, perlu kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lahat. *Collaborative Governance* merupakan konsep yang relevan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dalam melakukan penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat dengan turut serta melibatkan *stakeholder*. Hal ini dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan tertentu yang tidak dapat diwujudkan jika hanya dilakukan oleh satu pihak (Hanberger, 2004). Tata kelola kolaboratif hadir mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kolaborasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerjasama dalam pengambilan keputusan yang formal untuk mencapai hasil bersama (Susilowati et al., 2022).

Collaborative governance berasal dari banyak kajian teori keilmuan, diantaranya teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan teori komunikasi (Astuti, 2017). Model *collaborative governance* menurut H. Brinton Milward dan Keith G.

Provan dibagi menjadi model *self-governance*, *lead governance* dan *network administrative governance* (Milward & Provan, 2016).

Model Kolaboratif yang akan peneliti gunakan adalah teori menurut Ratner (2012) dimana terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi (Sunu Astuti et al., 2020), yaitu [1] Identifikasi Hambatan dan Peluang. Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. [2] Strategi Debat untuk Mempengaruhi. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. [3] Rencana Tindakan Kolaborasi. Tiga tahap *Collaborative Governance* dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tiga Tahap Indikator *Collaborative Governance*



Sumber: diadopsi dari teori Ratner (Sunu Astuti et al., 2020)

Proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada

tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi. Adapun fokus penelitian terdiri dari 3 dimensi, yaitu [1] *Identifying Obstacles and Opportunities*/Identifikasi Hambatan dan Peluang, [2] *Debating Strategies for Influence*/Debat Strategi untuk Mempengaruhi, dan [3] *Planning Collaborative Actions*/Tindakan Kolaborasi. Model kolaboratif hadir sebagai respons terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan model kolaboratif yang diperlukan dalam penanggulangan risiko banjir di Kabupaten Lahat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan metodologis yang berbeda dari penyelidikan mengeksplorasi masalah sosial atau manusia (Cresswell. John W, 2016). Menggali informasi secara akurat dan sistematis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Lahat. Penulis menggali informasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024.

Informan pada penelitian ini yaitu Kepala BPBD Kabupaten Lahat, Sekretaris BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Kedaruratan

dan Logistik BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lahat, Kepala Desa Daerah Terdampak, dan Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Lahat.

Teknik Pengumpulan Data berupa [1] Observasi, fokus pada kejadian yang sedang terjadi (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat berbagai hal dan peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat. [2] Wawancara. [3] Dokumentasi, adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksudkan yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari subjek penelitian serta data setiap file tertulis atau film, bukan catatan, dan lain-lain.

C. Hasil dan Pembahasan.

Hasil

Identifikasi Hambatan dan Peluang Identifikasi Masalah yang dihadapi

Berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa dalam identifikasi awal masalah penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat diperlukannya informasi dan data-data terkait wilayah Kabupaten Lahat yang terjadi banjir dan rentan terjadi banjir, yaitu data terkait topografi wilayah, jumlah penduduk, karakteristik wilayah, dan juga data-data evaluasi kejadian bencana yang pernah melanda Kabupaten Lahat.

Aktor Pengambil Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan informan dapat disimpulkan bahwa aktor utama dalam pengambilan kebijakan

dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat ini adalah Pemerintah Kabupaten Lahat, yang kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penganggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat.

Strategi Penanggulangan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penanggulangan bencana ini memerlukan regulasi dari pihak lain dan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Lahat melakukan strategi kebencanaan berdasarkan bidang-bidang tugas pokok, yaitu bidang pencegahan dan kesiagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BPBD Kabupaten Lahat, strategi yang dilakukan pertama dilihat dahulu data klasifikasi bencana tersebut barulah bisa menentukan strategi dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, dalam penanggulangan bencana BPBD ini dilakukan sesuai bidang-bidang kerjanya, ada bidang Kesiapsiagaan, kemudian bidang rekonstruksi dan logistik dan ada bidang kedaruratan. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Sumber: Dokumentasi BPBD 2023

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lahat Strategi selanjutnya dalam penanggulangan banjir kemudian pemasangan rambu-rambu kebencanaan, terus ada pemasangan alarm peringatan bencana dan untuk pemantauan banjir dan bencana lainnya, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pemasangan Alarm dan Pemasangan Rambu-Rambu



Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Lahat 2023

Strategi Debat untuk Mempengaruhi

Pihak yang Terlibat

Berdasarkan hasil wawancara yang di telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa dalam penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat yaitu pihak stakeholder melalui program *Corporate Social Responsibility*

(CSR) salah satunya itu ada PT. Pamapersada dan PT. Indo Agri, Dinas sosial, dinas kesehatan, dinas PUPR, TNI POLRI, Kepala Desa dan Masyarakat. Pihak yang terlibat dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pihak yang terlibat

Sumber: Dokumentasi BPBD 2023

Komitmen

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen berupa motivasi yang ditanamkan dalam diri untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses kolaborasi secara maksimal. Komitmen kuat dari setiap aktor terlibat sangat diperlukan untuk mencegah rasa kebosanan dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan *collaborative governance* pada upaya penanganan dan penanggulangan penanggulangan banjir pada bencana bencana banjir di Kabupaten Lahat, para pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan komitmen masing-masing untuk menjalankan Tata Kelola Kolaboratif (Hasna & Darumurti, 2023).

Stakeholders terutama Badan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Lahat yang memiliki wewenang dalam rangka merespon terkait bencana alam yang ada di Kabupaten Lahat, berusaha dengan keras dan sebaik mungkin dalam berkoordinasi dengan pemerintah

setempat melalui program-program penanganan bencana yang terjadi.

Rencana Tindakan Kolaborasi

Kolaborasi ini melibatkan mengidentifikasi kesempatan kolaborasi, menentukan tujuan bersama mengembangkan rencana kerja yang jelas, membagi tanggung jawab, dan mengatur sumber daya yang diperlukan (Noor et al., 2022). Langkah awal strategi, yaitu merencanakan tindakan kolaborasi, antara Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lahat (BPBD) dan pemangku kepentingan. Hasil, yaitu melakukan identifikasi hambatan dan peluang dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Lahat terkadang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah-masalah terkait data-data kebencanaan khususnya bencana banjir, namun secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, karena aktor dalam pengambilan keputusan, serta terdapat upaya strategi dalam penanggulangan bencana. Upaya kolaborasi, mengidentifikasi peluang kolaborasi, menetapkan tujuan bersama, mengembangkan rencana kerja yang jelas, membagi tanggung jawab, dan mengatur sumber daya yang diperlukan. Membangun komitmen terhadap proses kolaboratif tentunya memerlukan evaluasi proses dan hasil untuk menentukan apakah program telah mencapai hasil yang diinginkan hingga saat ini. Kolaborasi ini akan melibatkan pemerintah, BPBD, tokoh adat, dan masyarakat lokal.

Pembahasan

Identifikasi Hambatan dan Peluang

Identifikasi Masalah yang dihadapi

Identifikasi penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat di perlukan informasi dan data terkait wilayah yaitu data terkait topografi, wilayah, jumlah, penduduk, karakteristik wilayah ,dan juga data evaluasi kejadian bencana yang pernah melanda Kabupaten Lahat.faktor penyebab utama nya yaitu faktor alam,dan faktor perilaku masyarakat.

Aktor Pengambil Kebijakan

Aktor utama dalam pengambilan kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lahat ini adalah Pemerintah Kabupaten Lahat, kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penggulungan bencana adalah Badan Penaggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat.

Strategi Penanggulangan

Strategi dalam penaggulangan banjir ini terutama dalam bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan kita melakukan sosialisasi, kemudian pemasangan rambu-rambu kebencanaan, terus ada pemasangan alarm peringatan bencana dan untuk pemantauan banjir dan bencana lainnya

Strategi Debat untuk Mempengaruhi**Pihak yang Terlibat**

Penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat yaitu pihak stakeholder melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) salah satunya itu ada PT. Pamapersada dan PT. Indo Agri, Dinas sosial, dinas kesehatan, dinas PUPR, TNI POLRI,

Kepala Desa dan Masyarakat. Terdapat tiga aktor atau pelaku penanggulangan bencana, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Komitmen

Penanggulangan bencana memerlukan regulasi dari pihak lain, dan penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Rahat menerapkan strategi bencana berdasarkan bidang tanggung jawab utama, pencegahan dan kesiapsiagaan.

Rencana Tindakan Kolaborasi

Membangun komitmen terhadap proses kolaboratif tentunya memerlukan evaluasi proses dan hasil untuk menentukan apakah program telah mencapai hasil yang diinginkan hingga saat ini. Kolaborasi ini akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lahat, BPBD, pemangku kepentingan adat, dan masyarakat lokal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penguatan Model Kolaboratif dalam Penanggulangan Risiko Banjir di Kabupaten Lahat, yang dianalisis melalui tiga dimensi teori Ratner, yaitu Identifikasi Hambatan dan Peluang, Strategi Debat untuk Mempengaruhi, dan

Rencana Tindakan Kolaboratif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Model kolaboratif dalam penanggulangan risiko banjir di Kabupaten Lahat secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam proses identifikasi hambatan dan peluang, khususnya dalam pengumpulan dan pengelolaan data kebencanaan, terutama terkait banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat telah melibatkan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan adanya upaya strategis dalam mitigasi bencana, namun proses identifikasi yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas program.

Strategi debat untuk mempengaruhi dalam aksi kolaboratif telah diimplementasikan secara efektif, melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang responsif. Demikian pula, rencana tindakan kolaboratif seperti pelaksanaan evaluasi pasca-bencana telah dilakukan. Namun, pelibatan semua pihak dalam forum evaluasi masih menghadapi hambatan, karena tidak semua aktor dapat secara konsisten hadir dalam forum atau rapat evaluasi yang dijadwalkan.

Hambatan utama dalam model kolaboratif ini meliputi kesulitan akses dan koordinasi saat terjadi bencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan darurat di lokasi terdampak, serta kurang maksimalnya keterlibatan lintas pemangku kepentingan dalam evaluasi pascabencana. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi

dan komunikasi antar-lembaga serta antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, Y., Haris Wanto, A., & Amelia Novita, A. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat Di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(7), 360–367.
- Astuti, R. S. (2017). Flood Exposure of Lake Tempe in South Sulawesi. *Atlantis Press*, 366(Icisp 2018), 68–72.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Definisi Bencana*. BNPB. <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2021). *Profil Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020*. BPBD Sumsel. http://bpbd.sumselprov.go.id/asset/uploads/Profil_Kejadian_Bencana_Sumse1_Draft_1_01012021_BPBD.pdf
- BNPB. (2024). *Infografis Bencana Tahun 2023*. BNPB. <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2023>
- Cred. (2021). Extreme Events Defining Our Lives Executive Summary. *Centre for Research on the Epidemiology of Disasters*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/eee82e6e-en>
- Cresswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hanberger, A. (2004). Democratic governance and evaluation. *Paper Presented at the Sixth EES (European Evaluation Society) Conference, September 30 – October 2, 2004, Berlin, Germany*, 24 S.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37.

- <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- Hiraliyamaesa H, R. D., Iqbal, M. M., & Sutejo, Y. (2023). Evaluasi Penyebab Longsor Lereng Jalan di Kabupaten Lahat. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15573–15588. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14674>
- Indonesiabaik. (2024). *4.940 Bencana di Indonesia Speanjang 2023*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/4940-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>
- Lahat, K. (2020). *Geographi dan Monographi*. Kabupaten Lahat. <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/>
- Milward, H. B., & Provan, K. G. (2016). *A Manager's Guide to Choosing and Using Collaborative Networks*. IBM Center for the Business of Government.
- Munawal Akbar Idati, L. O., Muhammad Magribi, L. O., & Iakawa, I. (2020). Analisis Banjir Faktor Penyebab dan Prioritas Penanganan Sungai Andounuhu. *Civil Engineering Journal(SCiJ)*, 1(2), 54–71.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor (eds.)). Bildung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunu Astuti, R., Warsono, H., & Abd. Rachim. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (ed.)). Universitas Diponegoro Press.
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & ... (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. ... *Governance* ..., 5(2), 96–111. <https://igj.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/view/66>
- Tone, R., Syafriny, R., Tarore, R., S1, M., Studi, P., Wilayah, P., Universitas, K., Ratulangi, S., Pengajar, S., S1, P., Kota, D., & Arsitektur, J. (2022). *Kajian Kawasan Berpotensi Banjir Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Sangkub Di Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. *Jurnal Fraktal*, 7(2), 10–19.
- Utami, S. N. (2022). *Apa yang Menyebabkan Indonesia Rawan terhadap Bencana Alam ?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/152045469/apa-yang-menyebabkan-indonesia-rawan-terhadap-bencana-alam#:~:text=Indonesia merupakan wilayah Sirkum Pasifik,tempat bertemunya banyak lempeng tektonik.>